LAPORAN KINERJA
(LKj)

TAHUN 2021

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakekatnya merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Segala kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam laporan ini diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tobelo, Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara

VICTOR O MANGIMBULUDE.ST
PEMBINA IV/a
NIP. 197210212002121005

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2021.

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, mengemban tugas pokok yaitu : " ***Melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas Pembantuan*** ".

Visinya adalah : "**MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING** "

dengan misi :

1. ***Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan berbasis teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.***
2. ***Meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat melalui aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.***
3. ***Meningkatkan kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima.***

Pencapaian RPJMD yang dilaksanakaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 terdiri dari 6 indikator yaitu produksi perikanan, Produksi Pengolahan Hasil Perikanan, Konsumsi Ikan, Cakupan Bina Kelompok (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar), Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Nilai Tukar Nelayan.

Dari totalitas capaian kinerja terhadap capaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan, 6 indikator sasaran, yang mencapai presentase > 85%

atau berada pada kategori sangat berhasil sebesar 0 indikator sasaran, 70% - < 85% dengan kategori berhasil sebanyak 0 indikator sasaran, 55 - < 70 dengan kategori cukup berhasil sebanyak 0 indikator sasaran dan 0 indikator sasaran mencapai presentase < 55% pada kategori kurang berhasil.

Untuk mendukung pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 dilaksanakan 5 program dan 15 kegiatan, dengan pagu anggaran APBD Perubahan sebesar **Rp.** 9.697.369.572 dengan realisasi sebesar **Rp.** 9.237.900.655 (**90,50%**).

Untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik di masa datang maka diperlukan perencanaan yang idealnya dapat mengakomodasi semua kebutuhan pelaku utama (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat pengawas), anggaran yang lebih banyak, sumberdaya manusia yang kompeten dan *capable,* keterpaduan seluruh sektor serta dukungan dan koordinasi yang harmonis dari semua pihak guna terwujudnya visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahara Utara.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Keadaan Umum Kelautan dan Perikanan 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1. Maksud 1
2. Tujuan 2
3. Dasar Hukum dan Standar Penyusunan 3
1.3. Struktur Organisasi 3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.5. Pejabat dinas Kelautan dan Perikanan 5
1.6. Sumber Daya Manusia 6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 8
2.1. Pernyataan Visi dan Misi 8
A. Pernyataan Visi 8
B. Pernyataan Misi 10
2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 12
2.3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 14
2.4. Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 18
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 18
3.2. Analisis Capaian Kinerja 23

3.3. Akuntabilitas Keuangan 34
3.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 34
3.3.2 Belanja Administrasi Umum (BAU) serta
Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) 34
3.3.3. Belanja Modal 35
BAB IV. PENUTUP 38
LAMPIRAN 39

DAFTAR TABEL

1.1.	Daftar Pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	5
1.2.	Golongan dan Eselonering Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	6
2.1.	Penjelasan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan	9
2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	12
2.4.	Lampiran Perjanjian Kinerja	16
3.1.1.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	19
3.1.2.	Capaian Kinerja Serta Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	20
3.2.1	Tabel Realisasi NTN dan NTPi Tahun 2021	23
3.2.2.	Realisasi Total Produksi Perikanan Tahun 2021	28
3.2.3	Jumlah Kelompok Binaan DKP	32
3.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah 2021	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KEADAAN UMUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam Pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan kepemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, demokrasi dan membuka partisipasi masyarakat yang luas. Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara ber kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tentang adanya keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik berkala, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga dengan maksud memberikan gambaran kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja (LKj) adalah agar Instansi Pemerintah yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

3. Dasar Hukum dan Standard Penyusunan

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan,

Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini mengacu kepada

- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara pasal 18, Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara memiliki Bagan Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada lampiran I. Adapun Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Sekretariat membawahi :

1. Subag Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan

2. Subag Keuangan
3. Subag Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
   1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan
   2. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan
d. Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) membawahi :
   1. Seksi Bina Usaha
   2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
e. Bidang Perikanan Budidaya Membawahi :
   1. Seki Pengembangan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
   2. Seksi Pengelolaaan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terlampir. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu 45 orang Pegawai (29 orang status PNS, 16 PTT diperbantukan pada UPT BBI Lokal Kusuri,12 PTT diperbantukan pada UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kusuri , dan Pantai Pulau Gumilamo dan 2 orang, dan tenaga kontrak di bagian sekretariat 2 orang, dilengkapi sarana dan prasarana berupa gedung kantor dan peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sebagai Tindak Lanjut Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara pasal 18 dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok dan Kewajiban menyelenggarakan tugas kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dan melaksanakan tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.
2) Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan serta pelayanaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan.
4) Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Pembudidaya ikan dengan pemberian Rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanandan Usaha penangkapan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6) Dalam melaksanakan kebijakan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dibantu oleh 1 UPTD (Unit Pelaksana Teknis

Dinas). Yaitu: UPTD Budidaya Ikan Air Tawar yaitu Balai Benih Ikan (BBI) Kusuri.

1.5. PEJABAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada, dari semua jenjang jabatan terdiri dari eselon III, dan eselon IV dari semua jabatan yang telah terisi. Pada eselon III yaitu jabatan Sekretaris merangkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas. Berikut nama-nama Pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara :

Tabel 1.1. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL.	JABATAN
1	Viktor Mangimbulude ST 19721021 20012 1 005	Pembina	IV.a	PLT.Kepala Dinas
2	Viktor Mangimbulude ST 19721021 20012 1 005	Pembina	IV.a	Sekretaris
3	Mike Sekewael, S.Pt 19760915 200604 2 028	Penata Tkt I	III.d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Effa Afrine Agustin Rattu, S.Pt 19741211 2010012 004	PenataTkt I	III.d	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5	Rexy Yasenta Taroreh ,S.IK 19820628 201101 2 004	Penata	III.c	Kasubag Keuangan
6	Oktovianus M Mataputung. ST 19740507 200903 1 001	Pembina	III.d	Kabid Bina Usaha dan Pengelolaan TPI
7	Sariffudin, S.Pi, MP 19680302 200312 1 004	Penata Tk I	IV.a	Kasie Pengelolaan SDI dan TPI
8	Mick Pattiasina, ST 19750320 200903 1 001	Penata	III.d	Kasi Bina Usaha
9	Assryelwin Wirano, S.Pd 19770603 200312 1 010	Pembina	IV.a	Kabid Perikanan Budidaya
10	Junis Totoai Kojoba 19750601 201001 1 007	Penata	III.c	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya dan Kesehatan Ikan
11	Roberth Taraudu, S.Pt 19751020 201101 1 001	Penata	III.c	Kasi Peng. Usaha kecil Pembudidaya Ikan & Koordinator Haechtery Gumilamo

12	Achmad H Nurlette, S.Pi 19721030 200312 1 004	Pembina	IV.a	Kabid Perikanan Tangkap
13	Leyhard S Talangamin S.St pi 19671009 199103 1 002	Penata	III.c	Kasi Peng. Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan
14	Yunsirgus Wirtha A.Md 19730625 200604 1 012	Penata Muda	III.c	Kepala UPTD BBI Kusuri

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera utara ditopang dengan sumberdaya manusia (SDM) sebanyak 45 orang terdiri dari 29 orang PNS dan 16 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan sebaran 2 orang bertugas pada kantor Dinas kelautan dan perikanan, 10 orang bertugas di BBI Air Tawar Kusuri dan 2 orang di Heachetery pulau Gumilamo.

Golongan dan Esselonering Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Pegawai dengan golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 15 orang, dan golongan II sebanyak 10 orang. Untuk eselonering, eselon II tidak ada orang, eselon III sebanyak 3 orang dan eselon IV sebanyak 9 orang. Tenaga staf sebanyak 17 orang. Sebaran pegawai DKP menurut golongan dan eselonering sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2. Golongan dan Eselonering Aparatur
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	FUNG.	STAF	
GOLONGAN IV/E							
GOLONGAN IV/D							
GOLONGAN IV/C							
GOLONGAN IV/B							
GOLONGAN IV/A			4	1			4
JUMLAH GOLONGAN IV	**0**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**5**
GOLONGAN III/D				4			4
GOLONGAN III/C				4			4
GOLONGAN III/B							

GOLONGAN III/A						5	5
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**6**	**15**
GOLONGAN II/D						3	3
GOLONGAN II/C						5	5
GOLONGAN II/B						1	1
GOLONGAN II/A						1	1
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
GOLONGAN I/D							
GOLONGAN I/C							
GOLONGAN I/B							
GOLONGAN I/A							
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**1**	**4**	**10**	**0**	**14**	**30**

Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

12 Orang berpendidikan setingkat SLTA, 4 orang berpendidikan setingkat DIII, 12 orang berpendidikan setingkat S1 dan orang berpendidikan setingkat S2. Lebih langkapnya data pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara seperti terlihat pada Lampiran II.

Sebanyak 1 orang (4%) berpendidikan magister, 12 orang (34%) berpendidikan sarjana/diploma IV, 4 orang (17%) berpendidikan diploma III, dan 12 orang (45%) berpendidikan SMA.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/kebijakan yang ditentukan untuk 5 tahun. Selain itu Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Analisa terhadap kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada umumnya, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Renstra 2017-2021 sesuai yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Visi Misi Bupati Tahun 2017-2021.

2.1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

A. PERNYATAAN VISI

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana telah diuraikan pada bab I, diperlukan suatu komitmen bersama untuk seluruh anggota Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dituangkan dalam suatu pernyataan Visi. Rumusan pernyataan Visi, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

"MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING"

Makna yang terkandung dalam Pernyataan Visi tersebut adalah adanya suatu komitmen bersama bagi seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, diperlukan peningkatkan kualitas dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan melayani para Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar serta Masyarakat Pesisir lainnya dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi pada Pelayanan Prima, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diharapkan terwujudnya Masyarakat baik itu Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan dan Pemasaran serta Masyarakat disekitarnya yang maju dalam teknis pengelolaan usaha, mandiri secara modal dan sejahtera dengan bertumpu pada Pemanfaatan Potensi-Potensi yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan yang unggul dan setia menjaga kelestariannya serta menghasilkan produk-produk unggulan mutu yang berkualitas terbaik dan berdaya saing di manca Negara juga mampu menarik Investor Asing. Penjelasan visi Dinas Kelautan dan Perikanan seperti pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Penjelasan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, UNGGUL DAN BERDAYA SAING	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan HALUT yang mencakup sumberdaya manusia (aparatur, nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar serta masyarakat pesisir lainnya); sumberdaya alam (ikan dalam arti luas, wilayah pesisir dan laut) dan jasa lingkungan yang diarahkan dengan tujuan agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kelangsungan produktivitas SDKP yang berkelanjutan

	Profesionall	Aparatur yang berkualitas memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya berorientasi pada pelayanan prima
	Mandiri	Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar serta Masyarakat Pesisir yang berkualitas dengan bertumpu pada pemanfaatan SDKP diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang ditunjang dengan permodalan dan prinsip pembangunan berkelanjutan secara terpadu serta ramah lingkungan
	Unggul	Produk-produk SDKP yang Utama untuk menjadi Ikon atau Ciri Khas HALUT di Pasar Domestik dan Internasional
	Berdaya Saing	Produk-produk Unggulan SDKP HALUT yang dapat mampu menembus Pasar Domestik dan International dengan Mutu yang berkualitas serta mampu menarik Investor Asing

B. PERNYATAAN MISI

Untuk mempertahankan keberadaan Visi, maka perlu ditetapkan beberapa Misi. Misi merupakan suatu pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan menguraikan menjadi Misi yang harus dilaksanakan. Pernyataan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan mengandung makna "Suatu upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bekerja dan melayani, agar terciptanya makna bagi kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, Pengolah Ikan dan Pemasar serta

masyarakat pesisir lainnya secara khusus dan masyarakat halmahera utara secara umum, dengan memanfaatkan pengelolaan potensi perairan air tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan". Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan berbasis teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat melalui aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima.

2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat di lihat pada tabel 2.2. berikut ini :

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional dilandasi Kebersamaan yang Berkeadilan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
MISI KE – 3: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan alam yang Berwawasan Lingkungan dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas, Transformatif, dan Berkelanjutan, Kreativitas Berbasis Inovasi, serta pengawasan dalam pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan daya saing sektor unggulan melalui usaha ekonomi produktif dan investasi, untuk, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesadaran hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut di Kabupaten Halmahera Utara	Peningkatan jumlah produksi perikanan yang disertai akses berbasis teknologi yang ramah lingkungan	Meningkatnya produksi perikanan, penguatan SDM dan kelembagaan, serta penyediaan sarana prasarana dan kapasitas infrastruktur kelautan dan perikanan secara optimal
		Peningkatan Usaha perikanan dengan hasil produk yang unggul, berdaya saing, disertai akses distribusi dan pemasaran hasil perikanan dari hulu ke hilir	Mengembangkan kawasan sentra-sentra produksi melalui penerapan IPTEK dalam pengelolaan komoditas unggulan secara terpadu (hulu-hilir)

		Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan SDL	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan SDL, sekaligus meningkatkan pengawasannya
		Peningkatan Kualitas dan ketrampilan serta IPTEK dari Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur maupun dalam meningkatkan pelayanan pelayanan Publik dan penataan adminitrasi perkantoran bidang Kelautan dan Perikanan yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan kualitas aparatur bidang kelautan dan perikanan dalam meningkatkan pelayanan prima dan

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan belum dapat dijalankan secara maksimal. Permasalahan utama dan isu-isu strategis yang dihadapi ialah sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan serta minimnya pengetahuan dan ketrampilan dari pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
2. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perikanan;
3. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas;
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 70% dari potensi lestarinya, potensi budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya ikan air laut dan budidaya perikanan darat (kolam, tambak dan danau) baru dimanfaatkan sekitar 2,72% dari potensi kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan).
6. Minimnya kuantitas atau jumlah aparatur serta minimnya pengetahuan dan keterampilan aparatur yang mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Infrastruktur dan sarana prasarana belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya perikanan, pengolah dan pemasar produk hasil perikanan.

2.4 RENCANA KINERJA/PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

2.4.1 Rencana Kinerja

Rencana kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada Tahun 2021. Rencana Kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2021. Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara

2.4.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjejang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dijelolanya

Melalui dokumen penetapan kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara program dengan sasaran. Adapun Sasaran Renstra, Target serta Program dan Kegiatan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

NO	SASARAN DI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021		KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Peningkatan nilai SAKIP	65 (B)	Program Penunjan Urusan Daerah	Rp	805.098.652	APBD
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	25.000 ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	2.177.140.299	APBD
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	400 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	2.110.447.280	APBD
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Pelanggaran	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	463.998.519	APBD
		Peningkatan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	2 Kelompok		Rp	10.000.000	APBD

4	Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	Peningkatan produk olahan perikanan (ton)	1.100 ton	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	463.998.519	APBD
5	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Peningkatan PAD	75.000.000		Rp. 28.500.000		
		Peningkatan PDRB sektor kelautan perikanan	5%				

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DKP TAHUN 2021

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitatif dan kuantitas yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran , tujuan, visi, misi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan reviue dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2021 yang terbaru, sasaran strategis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari, Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran, Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan ,pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat, bermutu dan berkwalitas, Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah.

Untuk mengetahui perencanaan kinerja dari masing-masing sasaran strategis tersebut maka disusunlah perencanaan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja program dengan kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Diambil berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Sekertariat
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	jumlah capaian produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
		jumlah capaian produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
3	Meningkatnya Produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	jumlah penanganan pelanggaran dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terbentuk dalam 1 tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP

4	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	jumlah capaian peningkatan PAD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan
		Jumlah capaian peningkatan PDRB	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan Statitik Perikanan

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran yang merupakan indikator kinerja utama.

Prosentase Capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2. Capaian Kinerja Serta Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

NO	SASARAN DI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGATAN TAHUN 2021		REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	KET.
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Peningkatan Nilai SAKIP	65 (B)	53,60 (CC)	Program Peuumjang Urusan Daerah	Rp 805.000.000	Rp 471.114.820.	Rp 465.754.971.	APBD
2	Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul, dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	% Peningkatan jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	25.000 ton	20.659 ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp 2.177.140.299	2.124.000.001	3.992.500.000	APBD
				83%					
		% Peningkatan jumlah Produksi Perikanan budidaya	400 ton	300,8 Ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 2.110.447.280	2.379.142.996	2.188.507.750	APBD
				(75%) %					

3	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakatdalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan	penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan		%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 5.000.000	5.000.000	1.500.000	APBD
4	Meningkatnya produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	peningkatan produk olahan Perikanan (ton)	1.100 (ton)	864,17 ton (79%)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 463.998.519	11.500.000	6.750.000	
5	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Peningkatan PAD	75.000.000	28.000.000 37%		Rp -	-	-	

Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 & 2021

sasaran	Indikator Kinerja	Target		Capaian	Realisasi		Capaian
		2020	2021	(%)	2020	2021	(%)
Meningkatnya pelayanan publik dan penataan administrasi perkantoran	Peningkatan Nilai SAKIP	-	65 (B)	-	-	53,60 (CC)	-
Meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang unggul, dan berdaya saing dengan ketersediaan sarpras perikanan	Peningkatan jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	30.000	25.000	83,33	23.364	20.659	88,42
	Peningkatan jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	442,03	400	90,49	9525	300,8	3,16
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakatdalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan	penanganan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	-	2	-	-	3	-
Meningkatnya produk olahan perikanan dan tingkat konsumsi ikan masyarakat	peningkatan produk olahan Perikanan	1000	1.100	110,00	1.100	864,17	78,56
Meningkatnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PAD dan perekonomian daerah	Peningkatan PAD	-	75.000.000	-	-	28.000.000	-

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 2021 : Meningkatnya Daya saing sektor unggulan melalui

Usaha Ekonomi dan Investasi produktif serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan terbukanya kesempatan kerja yang layak utuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera Utara.

Sasaran 1 :

Meningkatnya dan berkembangnya usaha sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya.

Keberhasilan sasaran 1 ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu rata-rata pendapatan nelayan dibagi dengan rata-rata pengeluaran nelayan dengan melihat tingkat kemampuan daya beli nelayan, selain itu juga menunjukkan daya tukar produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, Semakin tinggi ***NTN (Nilai Tukar Pembudidaya),*** secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN ini menunjukan indikator dini kesejahteraan nelayan. Apabila dilihat capaiannya di tahun 2021 telah melampaui target diatas rata rata lebih dari 100 %, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel Realisasi NTN dan NTPi per bulan Tahun 2021

3.2.1. Tabel Realisasi NTN dan NTPi Tahun 2021

Bulan	Indeks Harga yang diterima Nelayan	Indeks harga yang dibayarkan nelayan	NTN	NTPi
Januari	121.4	116.7	10,19	9,80
Februari	122.3	115.0	9,84	9,40
Naret	122.6	116.7	9,92	9,70
April	122.9	116.7	9,76	8,90
Mei	126.0	123.3	9,89	8,95
Juni	127.4	128.3	9,85	9,00
Juli	126.3	125.0	9,80	8,80
Agustus	123.7	120.0	9,89	8,95
September	123.9	116.3	9,90	8,90

Oktober	125.1	116.7	9,84	8,90
November	125.4	116.7	9,81	8,90
Desember	128.3	116.7	9,82	8,80
Rata-rata	149.53	142.81	108,32	109,00

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 dari semuai indikator kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja tahun 2021 melebihi 100 %. Rata-rata capaian kinerja pada indikator ***Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN)*** dari target 106,70 mencapai 108,32 dan ***Indeks Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)*** dari target 104,10 mencapai 109. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan semakin membaik. NTN dan NTPi merupakan indikator untuk menilai kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual oleh pembudidaya ikan terhadap produk yang dibutuhkan pembudidaya ikan baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, secara umum diartikan bahwa NTN atau NTPi lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan tukar produk perikanan yang dihasilkan nelayan lebih ke rumah tangga nelayan, hal ini mengindikasikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan relatif sama dengan periode tahun lalu. Dari hasil perbandingan target indeks NTN dan NTPi 2021 lebih dari 100, Intinya terjadi peningkatan daya beli masyarakat petani dan nelayan dengan kata lain indeks yang diterima lebih besar dari indeks yang harus dibayarkan, walaupun dibandingkan dengan tahun 2020 hanya sedikit kenaikannya akan tetapi capaiannya melebihi target.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Produksi Perikanan dengan hasil produk yang unggul, bermutu dan berkwalitas

Dari tabel capaian kinerja diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi kelautan dan perikanan dengan presentasi capaian indikator kinerja perikanan tangkap dari target 25.000 ton hanya mencapai 20.659 ton dengan pencapaian hanya 83%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada

indikator perikanan budidaya dari target 400 ton hanya mencapai 300,8 ton, dengan pencapaian hanya 75%,

Hal ini disebabkan paskah merebaknya wabah covid 19, pemerintah menghimbau untuk mengurangi aktivitas diluar rumah. Bahkan pemerintah memperkuat himbauan tersebut dengan ditetapkannya dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan penyebaran covid 19. Dan ini berlaku juga di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, Sehingga banyak yang mengurangi aktivitas diluar rumah atau lebih populer dengan istilah ***Dirumah Saja*** sehingga berdampak pada penurunan pada hasil tangkapan Nelayan dan Pembudidaya.

Sama halnya dengan capaian kinerja pada indikator pengolahan hasil produksi perikanan, dengan adanya Pandemi Covid 19 ini mengalami penurunan hasil turun 110%. dari target 79 %. Dengan rata-rata capaian indikator produksi pengolahan hasil perikanan dari target 1100 ton, tidak mencapai target, hanya 864,17 ton, Hal ini disebabkan oleh karena kebanyakan masyarakat lebih banyak mengolah ikan dengan cara memasarkannya lewat Online dan hal lain juga yang mempengaruhinya yaitu oleh karena adanya olahan ragam komoditas ikan sehingga makin meningkatnya selera masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan konsumsi ikan selain ikan laut seperti Daging Hewan ternak dimasyarakat yang meningkat.

Nilai produk pengolahan hasil, ini juga dipengaruhi dengan adanya sarana prasarana pengolahan cold store yang dimiliki oleh Dinas kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan pihak perusahan swasta dalam pengelolaan hasil perikanan yang tidak beroperasi lagi dengan maksimal dengan kurangnya aktivitas yang dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja Operasional coldstore dan stok ikan yang kurang, dan banyak masyarakat nelayan yang tidak melaut.

Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena adanya pandemi covid 19 Rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap

budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ditahun mendatang adalah

- Diperlukan identifikasi dampak kebijakan covid 19 terhadap pelaku perikanan guna mengurangi resiko untuk mencegah keterpurukan Sektor perikanan.
- Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang membidangi perikanan tangkap yang membidangi sarana dan prasarana tamgkap, Budidadaya dan Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten/Kota
- Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang membidangi Perikanan budidaya UPT/ instalasi budidaya tentang fasilitas sarana dan prasarana budidaya UPT sesuai dengan identifikasi kebutuhan masing-masing
- Koordinasi terkait dengan pengelolaan dan kesehatan ikan ke Badan Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Pembinaan dan temu lapang dengan para nelayan,pembudidaya dan pengolah pemasar hasil perikanan

Dari data diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan telah mengalami penurunan penggunaan sumber daya kelautan perikanan.

Sasaran 3 :

Meningkatnya produksi perikanan sektor kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan

Keberhasilan sasaran 3 ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan peningkatan jumlah produksi perikanan komoditi unggulan yaitu nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Pada sektor unggulan ini yang terjadi pada tahun 2021 adalah pengurangan hasil produksi karena adanya Pandemi Covid 19 dan tidak terselenggaranya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan serta kurangnya peran kelembagaan terkait kepada masyarakat Nelayan dan Pembudidaya di Kabupaten Halmahera Utara

Sasaran 4 :

Meningkatnya profesionalisme dari aparatur Dinas Kelautan dalam pelayanan prima

Rata-rata capaian Indikator Cakupan Bimtek Tenaga Teknis dan Pembinaan kelompok nelayan mengalami penurunan dan tidak mencapai target, dikarenakan adanya penyesuain anggaran yang terjadi pada Tahun 2021 dengan adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan ini.

Sasaran 5 :

Meningkatnya keterampilan dan kwalitas SDM pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

Rata-rata capaian indikator kinerja, hanya kelompok kelautan dan perikanan yang mengalami peningkatan kelas walaupun tidak mendapatkan pembinaan berupa pelatihan bidang kelautan dan perikanan, tetapi partisipasi dalam pembuatan kelompok nelayan meningkat dengan adanya pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan pembudidaya melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta memfasilitasi dengan pemberian bantuan sarana dan pelatihan sehingga harapannya kelompok usaha kelautan dan perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas baik kemampuan personil maupun kelembagaannya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terjadi peningkatan realisasi kinerja yang signifikan. Penurunan kinerja tersebut oleh karena kurangnya koordinasi yang terjalin baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah pusat yaitu kementerian lembaga dan kelompok Kelautan perikanan Kabupaten Halmahera Utara serta pihak terkait dalam membantu pencapaian target .

Dari semua indikator kinerja diatas yang menjadi prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan peningkatan capaian hasil . Hal ini dikarenakan sebagian besar dipengaruhi oleh wabah penyebaran virus covid 19 sehingga menurunnya capaian hasil produksi walaupun

potensi sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Utara sangat besar . Pernyataan ini dapat terlihat pada tabel diatas Capaian Kinerja (tabel 3.1)

1) Indikator Produksi Perikanan

Berikut ini kami sajikan dalam bentuk Tabel target produksi perikanan tangkap dan budidaya di tahun 2021 serta realisasi yang didapat dari target tersebut sebagai berikut :

terlihat bahwa total target jumlah produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada, tahun 2017, total target produksi sebanyak 19.084 ton yang terdiri dari target produksi tangkap sebanyak 18.870 ton dan target produksi budidaya sebanyak 214 ton, tahun 2018 total target produksi 27.696 terdiri dari target produksi tangkap sebanyak 27.467 ton, dan target produksi budidaya sebanyak 229 ton, dan pada tahun 2019 total target produksi 33.753 ton terdiri dari target produksi tangkap sebanyak 33.375 ton, dan target produksi budidaya sebanyak 338 ton. Dan pada Tahun 2020 total target 33.442 terdiri dari Target Tangkap 33.000 dan Target budidaya 442 ton, Tahun 2021 total target 25.400 ton terdiri dari target tangkap 25.000 ton dn target Budidaya 400 ton. Dari target tersebut diatas maka diperoleh realisasi dari target tersebut seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.2. Realisasi Total Produksi Perikanan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Total Realisasi (Ton)	Produksi Tangkap (Ton)	Produksi Budidaya (Ton)
2017	19.084	18.870	214
2018	27.696	27.467	229
2019	33.753	33.375,12	377,88
2020	23.738	23.364	374
2021	20.959,8	20. 659	300,8

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi jumlah produksi perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 sebanyak 20.959 ton dari produksi tangkap sebanyak 20.659 ton dan produksi budidaya sebanyak 300,8 ton. dari target yang ditetapkan yang terdiri dari produksi tangkap sebanyak 25.000 ton dan produksi budidaya sebanyak 400 ton.

a) Realisasi Produksi perikanan tahun 2021 sebesar ton, dari target produksi perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sebesar 25.000 ton, maka persentase produksi perikanan yang dicapai pada tahun 2021 menurun sebesar 25 %. Dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2021 maka produksi perikanan tahun 2021 mengalami penurunan dari target RPJMD yaitu sebesar 25.000 ton. Adapun produksi perikanan terbagi atas produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2021
   sebesar 400 ton, dari target produksi perikanan budidaya tahun 2021, maka persentase produksi perikanan budidaya tahun 2021 adalah :
   (300,8 ton / 400 ton) x 100% = 75 %.
   Dari hasil tersebut maka produksi perikanan budidaya tahun 2021 mengalami penurunan dari target RPJMD. Adapun produksi perikanan budidaya terdiri Produksi Budidaya Air Tawar sebesar ton 300,8 ton
2. Produksi Perikanan Tangkap
   Produksi Perikanan Tangkap tahun 2021 sebesar 20.659 ton, sedangkan target produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 25.000 ton, maka persentase produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah : (20.659 ton / 25.000 ton) x 100% = 83% Dari hasil tersebut maka produksi perikanantangkap tahun 2021 mengalami penurunan dari target RPJMD. Adapun produksi perikanan Tangkap sebesar 20.659 ton.

b) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja produksi perikanan adalah :

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :

- ❖ Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Operasional UPTD Perbenihan Ikan Air Laut
- ❖ Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan (Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya UPTD)

➢ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :

- ❖ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ❖ Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil

c) Masalah yang dihadapi dalam Produksi Budidaya Perikanan tahun 2021 ini dengan adalah Adanya penyebaran wabah virus Covid 19 yang berpengaruh pada aktivitas keluar rumah, sehingga produksi mengalami penurunan. Kendala lainnya adalah kurangnya pakan dan modal usaha serta masih kurangnya pemahaman secara teknis dalam pengembangan usaha Budidaya Air Tawar dan Payau

d) Solusi dari permasalahan dimaksud adalah perlu adanya penanganan kebijakan covid 19 sehingga berkurangnya pembatasan aktivitas sehingga akan dapat terlaksananya peningkatan produksi dan pengembangan sarpras di bidang budidaya, pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur dan pembudidaya laut dan darat, penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan.

2) Konsumsi Ikan

a) Konsumsi Ikan tahun 2021 sebesar 64,60 Kg/Kapita/Thn, sedangkan target Konsumsi Ikan tahun 2021 sebesar 60,25 Kg/Kapita/Thn, maka persentase Konsumsi Ikan tahun 2021 adalah: (64,60 -60,25/60,25 Kg/Kapita/Thn) x 100% = 7,22 % .

Dibandingkan dengan target di RPJMD pada tahun 2021 maka realisasi Konsumsi Ikan tahun 2021 lebih rendah dari target RPJMD

b) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja Konsumsi Ikan

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasar Skala Mikro dan Kecil
  - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Sosialisasi Gemar Ikan dan Lomba Cipta Menu Perikanan

c) Masalah yang dihadapi oleh unit-unit pengolahan ikan adalah keterbatasan modal usaha untuk pengadaan sarana dan prasarana/ peralatan pengolahan serta pengadaan bahan baku pengolahan. Juga masalah dalam konsumsi ikan masyarakat adalah bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat relatif masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Namun jika melihat target RPJMD dengan realisasi tahun 2021 maka realisasi konsumsi ikan lebih tinggi daripada target RPJMD.

d) Solusi yang harus dilakukan untuk permasalahan dimaksud adalah dengan menyediakan unit – unit pengolahan hasil perikanan bagi kelompok pengolah yang lebih memadai dan ketersediaan stok ikan dari Nelayan Penangkap Ikan

3) Indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya Pengolah dan Pemasar

Untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2020 yaitu produksi perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2020 belum dapat melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Koordinasi terhadap Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) serta Kelompk Pengolah dan Pemasar

(Poklahsar) dikarenakan adanya penyesuaian anggaran karena wabah virus Covid 19, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.2.3. Jumlah Kelompok Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021

TAHUN	KUB	POKDAKAN	POKLAHSAR	POKMASWAS	TOTAL
2017	117	18	111	3	**249**
2018	147	57	40	3	**247**
2019	163	66	50	3	**282**
2020	252	96	80	1	**429**
2021	446	118	209	4	**779**

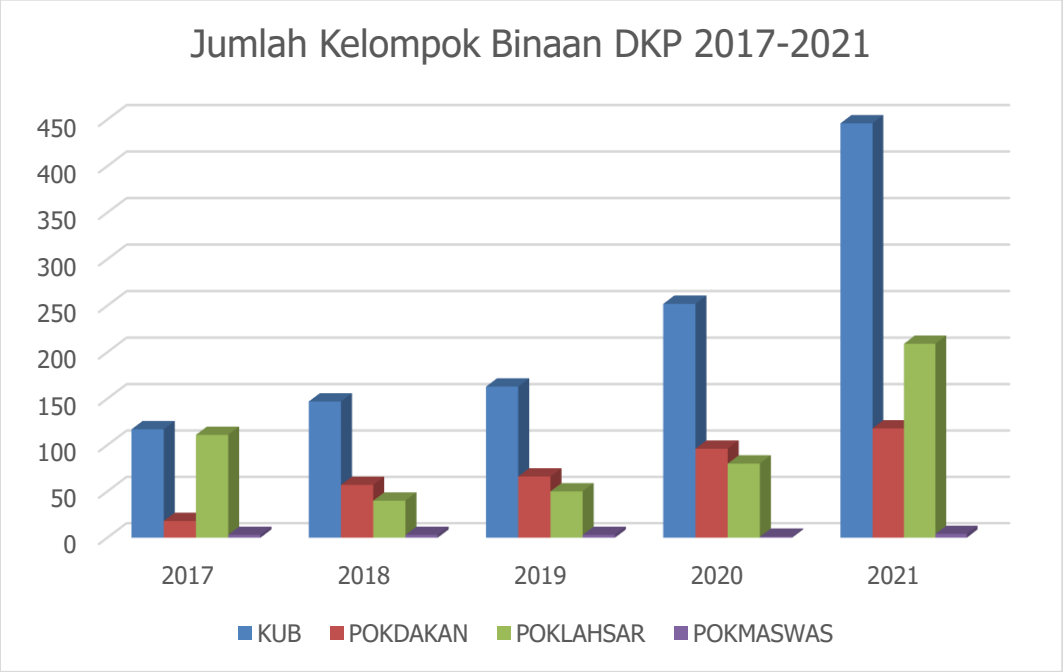

Dari grafik di atas, jumlah kelompok nelayan yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera utara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KUB mengalami kenaikan sebanyak 194 KUB dari target 82 KUB, Pokdakan mengalami kenaikan dari 22 Pokdakan dari target 40 Pokdakan, Poklahsar mengalami kenaikan sebanyak 129 Poklahsar dari target 40 Poklahsar sedangkan Pokmaswas tidak mengalami kenaikan atau 3 Pokmaswas dari target 1 Pokmaswas.

a) Cakupan Bina Kelompok sesuai target RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 sebanyak 88 kelompok, sedangkan realisasi yang tercapai sebanyak 273 kelompok, maka persentase Cakupan Bina Kelompok tahun 2020 adalah :

   (779 kelompok / 88 kelompok) x 100% = 0,59%

b) Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indicator Cakupan Bina Kelompok adalah :

   - Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan :
     - Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil
   - Program Pengelolaan PerikananTangkap, dengan kegiatan :
     - Pemberdayaan Nelayan Ikan Kecil dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
   - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan :
     - Pembinaan mutu dan keamanan hasil Perikanan bagi usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil skala Mikro dan kecil

c) Masalah yang dihadapi Cakupan Bina Kelompok untuk Poklahsar dan Pokmaswas adalah minimnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Sarana prasarana, pembinaan dan pendampingan bagi Poklahsar maupun Pokmaswas.

Solusi dari permasalahan dimaksud adalah dengan menyediakan sarana prasarana, meningkatkan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan malalui pembinaan dan pendampingan dengan menyediakan anggaran yang dialokasikan

untuk program dan kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan untuk Aparatur dan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Masyarakat Pengawas yang mendapat Pembinaan, Pendidikan dan Latihan serta Sarpras yang menunjang.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara memiliki realisasi pendapatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 28.000.000,- atau turun sebesar 37,35 % persen dari yang target ditetapkan dalam DPA TA 2021 sebesar 75.000.000,-. Adapun rincian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN
1.	BBI Air Lokal Kusuri (Penjualan Benih Ikan Nila) dan Nila Konsumsi 30.000 ekor x Rp 250-	Rp 7.500.000
2.	Sewa Gedung Coldstorage PT.Samudera Laut Biru Nusantara per Tahun	Rp. 0
3	Pengiriman Hasil Ikan Laut Bln Jan-Desember 2021	Rp. 4.000.000
4	Sewa lahan Gedung milik DKP di Lokasi Pelabuhan Tobelo	Rp. 17.000.000
JUMLAH		**Rp. 28.000.000**

3.3.2. Belanja Administrasi Umum (BAU) serta Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 pada APBD setelah Perubahan mengalami kenaikan dari pagu sebelumnya yaitu sebesar Rp.8.109.311.339 menjadi Rp. 9.697.369.572 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU Rp. 4.209.311.339,- Dana Alokasi Khusus

(DAK) sebesar Rp. 1.900.000.000,- dan Dana Insntif Daerah (DID) Rp. 2.500.000.000 .- sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.1. Prosentase Pencapaian Target BAU dan BOP Tahun 2021

No	Anggaran Belanja Rutin Tahun 2019	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Prosentase Pencapaian Target (%)
1	Belanja Pegawai (Gaji/Honor)	2.542.626.589	2.578.287.934	35.661.345	101.40
2	Belanja Barang dan Jasa	4.608.439.88	4.463.182.451	145.257.431	96,84
3	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000	2.500.000.000	0	100
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah	8.109.311.33	9.237.900.655	191.560.532	%

3.3.3. Belanja Modal

Anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 yang di alokasikan melalui belanja Modal adalah tidak ada sampai akhir tahun anggaran 2021,

Adapun Asset dan Modal sampai Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 3.3.3.1 Asset dan Barang Tahun 2021

NO. URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	01	01	**TANAH**	-	-	
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**			
		02	a. Alat-alat Besar	-	-	
		03	b. Alat-alat Angkutan	1	28.000.000	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	2	55.200.000	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	12	64.416.000	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	-	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-	
		09	h. Alat-alat Laboratorium	-	-	
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	-	
		11	h. Komputer laptop	2	22.561.000	
3	03		**GEDUNG DAN BANGUNAN**			

		11	a. Bangunan Gedung	-	-	
		12	b. Bangunan Monumen	1	60.000.000	
4	04		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**			
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	-	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	1	205.286.000	
		15	c. Instalasi	-	-	
		16	d. Jaringan	-	-	
5	05		**ASET TETAP LAINNYA**			
		17	a. Buku Perpustakaan	-	-	
		18	b.Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	
		19	c.Hewan Ternak dan Tumbuhan			
6	06	00	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	-	-	
Total					**412.902.000**	

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 berada pada kategori Sangat Berhasil, yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja dengan matriks sebagai berikut :

Evaluasi Pencapaian Sasaran

No.	Capaian Kinerja Indikator RPJMD (%)	Predikat	Jumlah Indikator RPJMD
1.	> 85	Sangat Berhasil	6
2.	70 - < 85	Berhasil	0
3.	55 - < 70	Cukup Berhasil	0
4.	< 55	Kurang Berhasil	0
Jumlah			6

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara menetapkan 6 indikator sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2021, yang mencapai presentase > 85% atau berada pada kategori sangat berhasil sebesar 0 indikator sasaran, 70% - < 85% dengan kategori berhasil sebanyak 0 indikator sasaran, 55 - < 70 dengan kategori cukup berhasil sebanyak 0 indikator sasaran dan 0 indikator sasaran mencapai presentase < 55% pada kategori kurang berhasil.

Dengan paparan diatas maka jelas tergambar kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara tahun 2021, maka diharapkan untuk lebih meningkatkan etos kerja setiap aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Good Governance sehingga visi Pemerintah Halmahera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan pada khususnya dapat terwujud.

Demikian laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
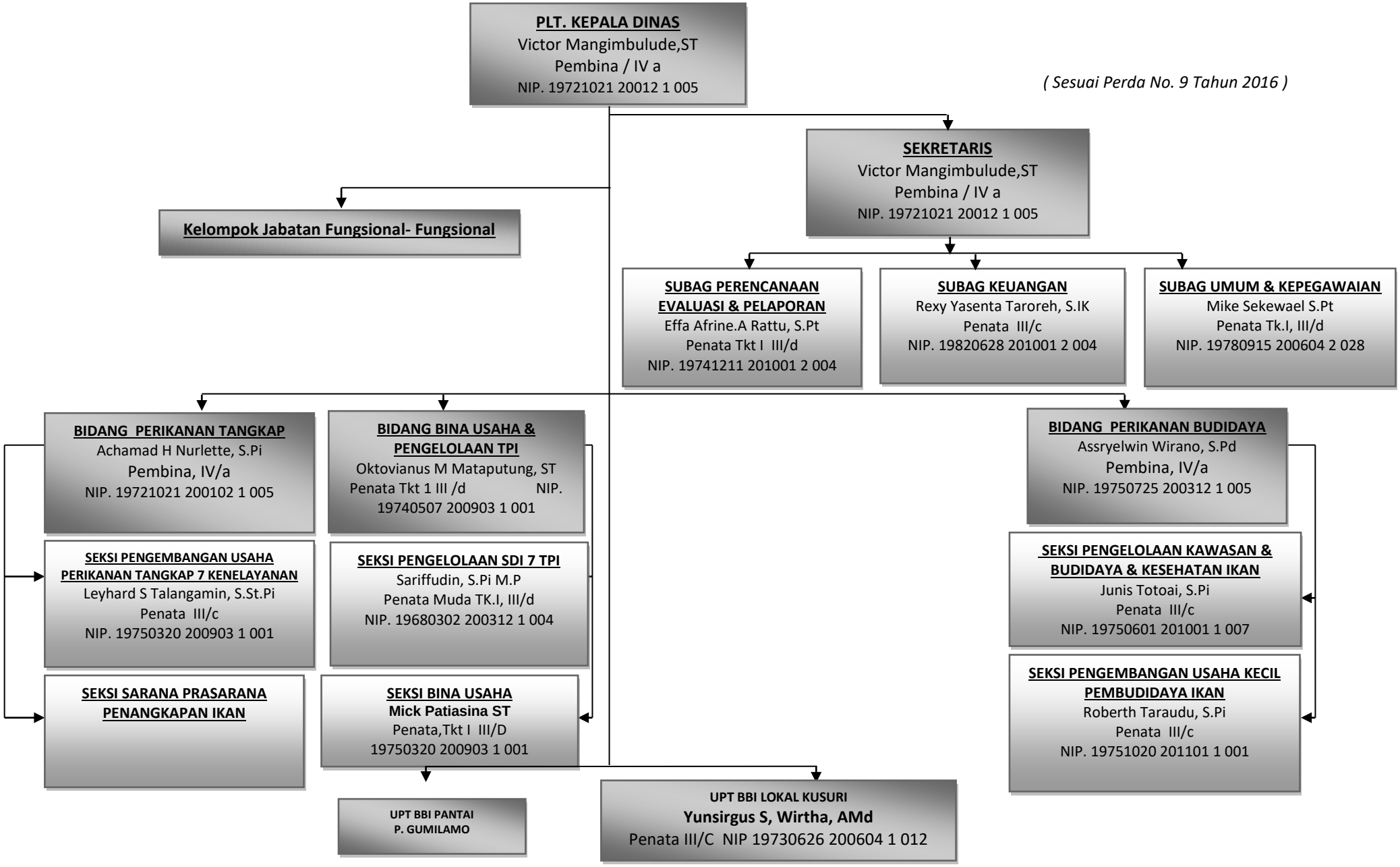
(Sesuai Perda No. 9 Tahun 2016)